

# ANALISIS MEKANISME PEMUNGUTAN DAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT

( Studi Kasus Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap Lombok Timur )

Irma Aulis Silvia  
Srikandi Kumadji  
Achmad Husaini

(PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya)

[115030407111067@mail.ub.ac.id](mailto:115030407111067@mail.ub.ac.id)

## ABSTRACT

*This type of research used in this research is descriptive research with a qualitative approach. This research intent to know how to regressive performing mechanism vehicle taxes, faced interference in vehicle taxes collection, and deep effort settle aught interference on SAMSAT East Lombok. Subject about problem which is interposed deep observational it arrears problem vehicle taxes on Office with Samsat East Lombok. This research got to be known that mechanism that is utilized in motor vehicle taxes collection on SAMSAT East Lombok corresponded to Governor regulation, but needs service step-up with regard society condition that is at that East Lombok Is more effective and efficient deep regressive motor vehicle taxes.*

**Key Words :** *Mechanism, Collection, Revenue, Motor Vehicle Tax*

## ABSTRAK

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemungutan pajak kendaraan, dan upaya-upaya yang dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada pada SAMSAT Lombok Timur. Pokok permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah masalah penunggakan pajak kendaraan pada Kantor Bersama Samsat Lombok Timur. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa mekanisme yang digunakan dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Lombok Timur telah sesuai dengan peraturan Gubernur, namun perlu peningkatan pelayanan dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat yang ada di Lombok Timur agar lebih efektif dan efisien dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor.

**Kata Kunci :** *Mekanisme, Pemungutan, Penerimaan, Pajak Kendaraan Bermotor*

## PENDAHULUAN

Hampir seluruh negara telah mengakui bahwa dengan seiring waktu, pajak telah menjadi sumber utama penerimaan Negara. Menurut Smeets (dalam Ilyas dan Burton (2013 :6) “pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui aturan-aturan yang jelas, dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya imbalan yang secara langsung yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah”. Dalam hal pemungutan pajak, pemerintah membedakan berdasarkan pada kriteria lembaga mana yang memungut pajak. Jika yang mengadministrasikan pajak adalah pemerintah pusat dalam hal ini pemerintah pusat, maka golongan pajak ini disebut sebagai pajak pusat. Sebaliknya jika yang memungut pajak adalah pemerintah daerah,

maka golongan pajak ini disebut pajak daerah. Mengenai pajak daerah, perannya sangat penting sebagai sumber Pendapatan daerah dan sebagai penopang Pembangunan Daerah. Undang-Undang yang mengatur tentang pajak daerah yakni Undang-Undang No 28 Tahun 2009. Undang-Undang tersebut mengatur mengenai pajak Provinsi yang dibagi menjadi 5 yaitu sebagai berikut :

1. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi mekanisme pelaksanaan pemungutan

dan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh SAMSAT Lombok Timur, hambatan-hambatan yang timbul dalam mekanisme pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Lombok Timur dan upaya Kantor SAMSAT Lombok Timur dalam menghadapi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Salah satu hambatan yang dihadapi oleh SAMSAT Lombok Timur yakni mengenai penunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor (Lomboktoday,2015). Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui mekanisme pelaksanaan pemungutan dan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Lombok Timur, mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pemungutan dan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Lombok Timur, dan mengetahui upaya-upaya Kantor SAMSAT Lombok Timur dalam menghadapi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemungutan dan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

## TINJAUAN PUSTAKA

### Tinjauan Teoritis

#### Pajak

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Andriani dalam Nurmantu (2005 :12) adalah sebagai berikut : “ Pajak adalah iuran kepada Negara yang sifatnya memaksa yang terhutang oleh wajib pajak dan wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan yang ada, dengan tidak mendapatkan imbalan kembali yang dapat langsung ditunjukkan dan yang fungsinya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.” Menurut Soemitro dalam Pudyatmoko (2009:7) unsur-unsur pajak adalah sebagai berikut :

- a. Ada masyarakat  
Masyarakat atau kepentingan umum dalam suatu negara.
- b. Ada undang-undang  
Dengan adanya undang-undang atau peraturan dapat menjadi tolak ukur dalam pemunutan pajak.
- c. Subjek Pajak  
Masyarakat atau orang-orang tertentu yang wajib pajak atau yang membayar pajak yang telah sesuai dengan undang-undang.
- d. Objek Pajak  
Sesuatu yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang.
- e. Surat Ketetapan Pajak.

Surat ketetapan pajak yakni surat yang digunakan untuk menetapkan pajak dalam pemungutan pajak.

### Sistem Pemungutan Pajak dan Asas Pemungutan Pajak

Menurut Nurmantu (2005:106) Sistem pemungutan pajak di Indonesia yakni :

1. *Self Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya utang pajak yang harus di bayar mulai dari menghitung, menyeter hingga melaporkan sendiri pajak terutangnya.
2. *Official Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak dalam hal menentukan besarnya utang pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak ditentukan oleh fiskus (pemungut pajak).
3. *Witholding Tax System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak terutang.

Menurut Nurmantu (2005:79) di Indonesia terdapat asas pemungutan pajak yakni :

#### a. Asas Sumber

Asas yang menganut cara pemungutan pajak yang tergantung pada adanya sumber penghasilan, maka negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal.

#### b. Asas Domisili

Berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan tersebut merupakan kewarganegaraan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini tidaklah menjadi persoalan darimana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal.

#### c. Asas Nasional

Asas Nasional atau asas yang kewarganegaraan, dalam asas ini yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan.

#### d. Asas Yuridis

Asas ini didasarkan pada undang-undang. Hukum pajak harus memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan yang tegas baik untuk negara maupun untuk warganya.

### Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungutannya

Menurut Siahaan (2013:9) secara garis besar, hierarki pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Begitu pula jenis pajak menurut lembaga pemungutannya dibagi menjadi dua yakni pajak daerah dan pajak pusat. Pajak pusat adalah pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh pemerintah pusat berdasarkan peraturan atau undang-undang, begitu pun sebaliknya pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah.

**Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah membagi Pendapatan Daerah yakni :

- 1. Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
- 2. Dana Perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
- 3. Pendapatan lain daerah yang sah

**Pajak Daerah**

Menurut undang-undang No 28 Tahun 2009 Pajak Daerah adalah pajak wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa dan pemungutannya berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat.” Jenis pajak daerah dibagi menjadi 2 jenis yakni pajak provinsi dan pajak kabupaten.

**Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat No 8 Tahun 2013 Tentang Pajak Daerah “Pajak Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan beroda dalam semua jenis beserta gandengannya yang dipakai atau digunakan di darat yang digerakkan oleh tenaga teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumber daya energi ke tenaga gerak, kendaraan tersebut yakni meliputi alat-alat berat dan alat-alat besar yang dimana pengoperasiannya menggunakan roda dan tidak melekat secara permanen serta jenis kendaraan bermotor yang di operasikan di air dengan ketentuan tertentu.” Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor yang beroda yang digunakan di semua jenis jalan darat dan air, tidak

melekat secara permanen yang digerakkan oleh peralatan teknik. Objek pajak kendaraan bermotor adalah yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah badan atau orang pribadi yang memiliki serta menguasai kendaraan bermotor. Dikecualikan dari objek pajak kendaraan bermotor menurut undang-undnag PDRD pasal 3 ayat 3 yakni:

- a. Kereta api
- b. Kendaraan bermotor yang dipakai untuk keperluan pertahanan keamanan
- c. Kendaraan yang dimiliki dan dikuasai oleh perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.
- d. Objek pajak lain yang ada dalam peraturan daerah lainnya.

**Efektivitas**

Menurut Erwis dalam Yani (2013: 2) pengertian efektivitas adalah suatu ukuran untuk menyatakan seberapa jauh target kualitas, kuantitas, dan waktu yang telah tercapai, jika makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi pula efektivitasnya. Tabel kalasifikasi pengukuran efektivitas sebagai berikut :

**Tabel 1 : Klasifikasi Pengukuran Efektivitas**

No	Presentase	Kriteria
1	>100%	Sangat efektif
2	90-100%	Efektif
3	80-90%	Cukup efektif
4	60-80%	Kurang efektif
5	<60%	Tidak efektif

Sumber : Nurlan (2006 : 49)

**METODE PENELITIAN**

Penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Subana (2005 : 89) penelitian deskriptif adalah menuturkan serta menafsirkan data yang berkaitan dengan fakta, keadaan,variabel, dan keadaan yang terjadi pada saat penelitian sedang berlangsung dan menyajikannya apa adanya. Fokus penelitian adalah konsentrasi pada tujuan yang dilakukan oleh peneliti. Fokus penelitian yang ditetapkan peneliti yakni :

- 1. Pelaksanaan mekanisme pemungutan pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Lombok Timur
- 2. Faktor-faktor penghambat pemungutan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Lombok Timur
- 3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pemungutan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Lombok Timur.

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti yakni Kantor Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yakni peneliti sendiri dan dari sumber-sumber internet dan buku. Data yang digali sendiri oleh peneliti maupun sumber-sumber lain digunakan untuk menyelesaikan fenomena yang akan diteliti oleh peneliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni wawancara dan dokumentasi

Sesuai dengan penelitian ini, instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti yakni Pedoman Wawancara dan Pedoman Dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif. Dalam Miles dan Huberman (2009 :16) mengemukakan analisa dengan menggunakan model interaktif menggunakan tiga prosedur yakni reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/ Verifikasi.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Tabel 2 : Target dan Realisasi Penerimaan PKB di SAMSAT Lombok Timur**

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2011	19.203.573.218	13.055.083.020
2	2012	22.331.589.000	14.565.813.964
3	2013	26.131.689.004	16.682.474.605
4	2014	30.892.105.000	21.337.378.011

Sumber : Unit Pelayanan Terpadu (UPTD) Lombok Timur ( 2015)

**Analisis Efektivitas Penerimaan PKB SAMSAT Lombok Timur**

Berdasarkan rumus umum yang digunakan menghitung efektivitas penerimaan PKB di hitung dengan rumus perbandingan antara target dan realisasi penerimaan.

Efektivitas Penerimaan PKB = 
$$\frac{\text{realisasi penerimaan PKB}}{\text{target penerimaan PKB}} \times 100\%$$

Dari rumus tersebut didapatkan hasil efektivitas penerimaan PKB seperti pada tabel 3 yakni :

**Tabel 3 : Efektivitas Penerimaan PKB SAMSAT Lombok Timur**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Perse ntase	Kriteria
2011	19.203.573.218	13.055.083.020	67,98 %	Kurang efektif
2012	22.331.589.000	14.565.813.964	65,23 %	Kurang efektif
2013	26.131.689.004	16.682.474.605	63,84 %	Kurang efektif
2014	30.892.105.000	21.337.378.011	69,07 %	Kurang efektif

Sumber : data diolah (2015)

Berdasarkan tabel 3 realisasi penerimaan pajak kendaraan pada SAMSAT Lombok Timur tahun

2011-2014 kurang efektif karena berada kurang dari 90%. Penerimaan PKB pada SAMSAT Lombok Timur kurang efektif disebabkan karena penerimaan tidak mencapai target diakibatkan wajib pajak masih ada yang menunggak

**Analisis Mekanisme Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada SAMSAT Lombok Timur.**

Mekanisme atau tata cara yang digunakan dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Lombok Timur memang telah sesuai dengan peraturan yang ada di Lombok Timur. SAMSAT Lombok Timur dalam pemungutan membuka 3 loket. Locket 1 dilakukan pengecekan kendaraan baru, melakukan pendaftaran, dan penelitian serata penomoran kendaraan. Locket 2 dilakukan penetapan pajak kendaraan, korektor dan jasa raharja. Locket 3 biasanya tempat pembayaran dan penyerahan pelunasan PKB/SKPD serta STNK.

**Analisis Hambatan Yang Timbul Dalam Pemungutan PKB SAMSAT Lombok Timur**

Hambatan merupakan hal yang bisa menghalangi tercapainya suatu tujuan. Pada pemungutan pajak kendaraan di SAMSAT Lombok Timur terdapat beberapa hambatan yang bisa mempengaruhi jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor yakni:

- 1. Banyak masyarakat yang kredit kendaraan tanpa uang muka
- 2. Merasa terbebani dengan biaya Samsat
- 3. Banyak kendaraan hilang
- 4. Banyak yang menggadai kendaraan
- 5. Banyak jual-beli kendaraan yang begitu cepat.

Hambatan-hambatan tersebut memang merupakan faktor eksternal akan tetapi menurut analisa peneliti bukan hanya faktor tersebut yang menjadi hambatan akan tetapi faktor juga berasal dari internal seperti masih terbatasnya sumber daya aparat baik secara kualitas maupun kuantitas.

**Analisis Upaya mengatasi Hambatan dalam Pemungutan PKB SAMSAT Lombok Timur**

Melihat kondisi dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh SAMSAT Lombok Timur merupakan hambatan yang lebih dominan berasal dari faktor eksternal. Adapun usaha-usah yang dilakukan oleh SAMSAT Lombok Timur yakni dengan cara :

- 1. Banyaknya kredit kendaraan dengan cara bekerjasama dengan pihak kreditur untuk membatasi jumlah kredit kendaraan dan harus di sertai alasan yang kuat apabila

terjadi pemindah tanganan kredit kepada orang lain

2. Melakukan operasi gabungan/razia dengan bekerjasama dengan dinas kepolisian dan dinas perhubungan. Operasi gabungan dilakukan dalam 1 bulan yakni 6 kali.
3. Mengadakan Samsat Keliling dengan begitu para pegawai Samsat lebih mudah mengetahui kendaraan yang tergadai dan mendatanya dengan cepat.
4. Mendirikan drive thru yakni layanan pengesahan STNK, pembayaran PKB dan SWDKLLJ di luar kantor Samsat Lombok Timur.

Mengatasi hambatan-hambatan tersebut memang cukup baik akan tetapi ditambah dengan pengawasan yang kuat dan peningkatan pelayanan dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat yang ada di Lombok Timur.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme pemungutan PKB pada SAMSAT Lombok Timur yakni di bagi menjadi 3 loket. Kantor Samsat bekerjasama dengan kepolisian, dispenda, dan jasa raharja. Di loket 1 yang bertugas adalah kepolisian, untuk melakukan cek fisik kendaraan baru, pendaftaran, penelitian, dan penomeran kendaraan. Locket 2 yang bertugas adalah dispenda/jasa raharja, untuk penetapan pajak kendaraan bermotor dan penetapan jasa raharja. Locket 3 yang bertugas adalah kepolisian dan dispenda sebagai korektor, tempat pembayaran, dan penyerahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (WPKB) berupa pelunasan PKB/SKPD dan STNK.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Samsat Lombok Timur yakni banyak masyarakat yang kredit kendaraan tanpa uang muka, merasa terbebani dengan biaya Samsat, banyak kendaraan yang hilang diperkirakan sekitar kurang lebih 35 buah motor yang hilang dalam 1 bulan, banyak masyarakat yang menggadai kendaraan, dan jual-beli kendaraan yang teralalu cepat.
3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Samsat Lombok Timur yakni melakukan operasi gabungan/razia 6 kali dalam 1 bulan, melakukan Samsat Keliling, dan pendirian drive thru yakni tempat membayar pajak bukan hanya di kantor

Samsat tetapi di luar kantor Samsat dengan membuat stan-satan di tempat tertentu.

### Saran

1. Perlunya ditempatkan petugas-petugas tambahan sebagai pengarah lapangan untuk memantau pelaksanaan di lapangan dan penambahan jumlah *drive thru* di beberapa kecamatan.
2. Diharapkan agar mengefisiensikan waktu dan memuaskan pelayanan untuk beberapa tahun kedepan pelayanan yang diberikan jangan hanya *drive thru* dan samsat keliling, akan tetapi membuka pelayanan samsat *delivery order*, pelayanan sistem online dan pelayanan-pelayanan lainnya dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat yang ada di Lombok Timur. Cara yang dilakukan yakni dengan melakukan sosaialisai kepada masyarakat mengenai pelayanan-pelayanan yang akan diterapkan dalam SAMSAT Lombok Timur sehingga mereka memahami pelayanan-pelayanan yang akan digunakan di SAMSAT Lombok Timur
3. Perlunya peningkatan sumber daya agar dapat memanfaatkan pelayanan dengan kemajuan teknologi yang ada untuk mengurangi kurangnya keterampilan dalam komputer maupun hal lainnya, sehingga memudahkan dalam pelayanan ketika wajib pajak membayar pajak kendaraannnya agar lebih efisien dan efektif. Peningkatan Sumber Daya kepada para pegawai maupun masyarakat dengan cara para pegawai aktif mengikuti pelatihan-pelatihan komputer kemudian mensosialisasikan kepada masyarakat.
4. Efektifitas penerimaan masih kurang efektif untuk meningkatkan keefektifan dan realisasi penerimaan caranya dengan meningkatkan pengawasan dalam hal pemungutan pajak kendaraan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim.2015.“Pembayaran Pajak Kendaraan”.diakses tanggal 2 Februari 2015dari<http://lomboktoday.co.id/20150129/pembayaran-malas-bayar-pajak-kendaraan.html>
- Erwis, Nana Andriana. 2012. *Efektivitas Penerimaan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan*.

Ilyas, Wirawan B dan Richard Burton. (2013).  
*Hukum Pajak Edisi 6*. Jakarta : Salemba Empat.

Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman.  
(2009). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : UI Press.

Nurmantu, Safri. (2005). *Pengantar Perpajakan*.  
Jakarta: Granit.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan  
Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa  
Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2011  
Tentang Pajak Daerah.

Priambodo, Magisty Purboyo. (2010). *Kontribusi  
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor  
Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Skripsi :  
Malang

Pudyatmoko, Y. Sri. (2009). *Pengantar Hukum  
Pajak*. Yogyakarta : Andi

Republik Indonesia Undang-Undang No 28  
Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan  
Retribusi Daerah

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 33  
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Siahaan, Marihot Pahala. (2013). *Pajak Daerah dan  
Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: PT.  
Raja Grafindo.

Subana dan Sudrajat. (2005). *Dasar-Dasar  
Penelitian Ilmiah*. Bandung : Pustaka Setia

